

# Aset Kalbar Raib Rp 1,95 M

## ■ BPK Soroti Kontribusi Rp 8 Miliar ■ Hasil Kerjasama Eks Lahan KONI

PONTIANAK, TRIBUN - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, memberikan 26 temuan dari hasil pemeriksaan aset manajemen Pemprov Kalbar, dalam rapat paripurna istimewa di DPRD Kalbar, Kamis (3/11).

Di antara temuan BPK adalah adanya barang milik Pemprov Kalbar senilai Rp 1,95



TRIBUN/DOK

” DPRD Kalbar kiranya menggunakan hasil pemeriksaan tersebut untuk melaksanakan hak budget, hak kontrol, dan hak legislasi. ”

**RIZAL DJALIL**

Anggota BPK RI

miliar yang raib atau tidak diketahui keberadaannya.

Hal lain, perjanjian pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga lemah dan belum menguntungkan Pemprov.

Yang dicontohkan antara lain perjanjian kerjasama Pemprov dengan PT CPM terkait pemanfaatan lahan eks tanah hak pakai KONI di Jl A Yani, yang hanya memberikan kontribusi Rp 8 miliar.

Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Kalbar, Cornelis, beserta jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rapat

## Aset Kalbar Raib Rp 1,95 M

Sambungan Hal. 1

paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kalbar, Minsin.

Rizal juga mengatakan, beberapa mitra kerjasama bangunan guna serah (Bulit, Operated, and Transfer atau BOT) belum dikenakan retribusi kekayaan daerah seperti dengan PT NSI, engan Restoran SB, dengan Rumah Makan AU.

Ketua Fraksi PPP, Retno Pramudya, mengatakan, hasil pemeriksaan manajemen aset Pemprov Kalbar harus segera ditindaklanjuti. Ia mencontohkan aset KONI yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

"Berdasarkan berbagai peraturan dan perundang-undangan, dalam hal kerjasama dengan pihak ketiga, harus persetujuan DPRD. Jika tidak, menyalahi mekanisme," Retno.

Terkait setoran Rp 8 miliar dari pihak ketiga yang akan mengelola aset eks lahan KONI, DPRD tidak pernah mendapatkan informasi yang benar. "Terkesan ada masalah sehingga masyarakat tidak diinformasikan," ujarnya.

Karena itu, menurut Retno, mekanisme dan perjanjian batal demi hukum. Perjanjian harus diperbaiki dan dibahasnya dengan DPRD mengenai nilai aset kerjasama, termasuk apakah sudah layak setoran kerjasama Rp 8 miliar.

Retno mengatakan, ada sejumlah aturan yang berpeluang untuk dilanggar, karena itu DPR perlu membentuk Pansus Aset.

Aturan itu di antaranya UU No 12 Tahun 2008 perubahan ke-2 UU No 32 Tahun 2004 pasal 42 ayat (1) huruf k, yang isinya DPRD memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Kemudian, UU No 27 Tahun 2009 pasal 293 ayat (1) huruf i, yakni tugas dan wewenang DPRD memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Lalu, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan PP No 50 Tahun 2007 ten-

tang Kerja Sama Antardaerah, dengan Pihak Ketiga.

Ia mengungkapkan, saat ini ada 21 anggota dari 55 anggota DPRD Kalbar yang sudah menandatangani persetujuan pembentukan Pansus Aset.

Retno menyesalkan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kalbar yang diketuai Ketua DPRD, Minsin, belum menjadwalkan rapat untuk pembentukan Pansus Aset. "Padahal, sudah dua kali diajukan, terakhir Februari lalu," kata politisi PPP ini.

### Siap Naikkan

Bagaimana tanggapan Gubernur Cornelis? Terkait hasil pemeriksaan aset manajemen yang dilakukan BPK, ia mengatakan patut berbangga telah berhasil mencatatkan harta kekayaan Pemprov Kalbar untuk pertama kalinya.

Dikatakannya, semuanya ini tercapai atas kerjasama dengan seluruh pihak, baik DPRD Provinsi dan BPK RI.

"Selanjutnya, yang ditindaklanjuti ini adalah masalah anggaran. Misalnya, kalau suratnya belum, harus bikin dan ini perlu anggaran. Ada juga yang dipakai rakyat, kita tanyakan kalian ini mau diapakan nih. Mau pergi atau mau ganti, hasil itu akan kita bicarakan dengan dewan," ujar Cornelis.

Semuanya itu akan ditindaklanjuti, dan minimal tahun ini sudah ada gambaran. Tindaklanjutnya termasuk masalah nilai aset yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga. Jika memang dinilai terlalu rendah, maka akan dinaikkan sesuai dengan nilai pasar.

"Yang paling penting bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan sehingga rakyat bisa makan dan hidup layak," katanya.

Terkait aset KONI yang dinilai bermasalah, Cornelis menyampaikan, akan menindaklanjuti dan akan tetap berjalan penanganannya.

Menurut Gubernur, aset KONI bukan dijual, tetapi hanya berupa kerjasama. Dalam kerjasama tersebut, pemerintah daerah mendapatkan dana sebesar Rp 8 miliar.

"Untuk KONI, tidak perlu persetujuan itu (dewan), kan tidak dijual. Kalau lepas, barulah persetujuan. *Dak* melepas dan nambah duit, *dak* perlulah persetujuan," tegasnya.

Ketua DPRD Kalbar, Minsin, menuturkan masalah aset adalah masalah bersama yang perlu penyelesaiannya. Yang diperlukan adalah kesepakatan bersama untuk membahas aset.

"Antara DPRD dan Gubernur itu perlu duduk satu meja. Mau diapakan aset tersebut, dihapuskan atau ditarik kembali. Untuk yang diduduki rakyat puluhan tahun, tidak mungkin gratisan. Penghapusan bukan berarti secara cuma-cuma. Pelepasan hak ada nilai-nilai juga," ujar Minsin.

Pemerintah, lanjut Minsin, diminta untuk menghitung ulang kerjasama dengan pihak ketiga terhadap penggunaan aset Pemprov. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK yang menilai terlalu rendah nilai retribusi dan perlu peningkatan.

"Kita akan hitung ulang nilai kerjasamanya. Kerjasama dengan pihak ketiga ini diharapkan bisa lebih menguntungkan di pihak kita. Karena *toh* kembalinya kepada keuangan daerah juga," katanya.

### Raib Rp 1,95 M

Anggota BPK Rizal Djajil dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kalbar mengungkapkan, ada 26 temuan pemeriksaan yang ditinjau dari aspek perolehan, aspek penggunaan dan pemanfaatan, aspek pengamanan dan pemeliharaan, maupun aspek penghapusan dan pemindahtanganan.

Selain persoalan perjanjian pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga lemah dan belum menguntungkan Pemprov, BPK menemukan adanya barang milik Pemprov Kalbar minimal senilai Rp 1,95 miliar yang tidak diketahui keberadaannya.

Aset itu berupa peralatan dan mesin pada Dinas Sosial senilai Rp 1,5 miliar, dan Dinas Pendidikan minimal senilai Rp 409 juta.

"Ini permasalahan yang sudah lama terjadi dan hingga kini berlarut-larut penyelesaiannya, juga menjadi catatan BPK RI dan perlu penyelesaian segera oleh Pemprov Kalbar," kata Rizal.

Kemudian, kata dia, aset-aset yang diperoleh dari hibah atau bantuan pemerintah pusat tidak jelas statusnya senilai Rp 3,84 miliar lebih.

Tidak itu saja, ada juga penggunaan dan pemanfaatan aset peralatan dan mesin milik

Pemprov Kalbar yang tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp 2,89 miliar lebih.

Selain itu, tanah milik Pemprov Kalbar yang dikuasai oleh pihak ketiga senilai Rp 917 juta lebih. Tanah ini terdiri atas enam bidang tanah seluas 155.124 m<sup>2</sup> tersebar di Pontianak, Singkawang, dan Bengkayang, telah dikuasai pihak ketiga.

Selain itu, pengamanan tanah milik Pemprov Kalbar yang belum optimal atau belum bersertifikat senilai Rp 79,9 miliar. Dari 893 bidang tanah yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2010, hanya sebanyak 290 bidang tanah yang bersertifikat.

Di antara 290 bidang tanah yang bersertifikat tersebut, sebanyak 144 bidang tanah dengan luas 2.803.989 m<sup>2</sup> masih bersertifikat tidak atas nama pemprov.

Rizal menambahkan, Kalbar merupakan daerah pertama yang dilakukan pemeriksaan atas asetnya. "Dari pemeriksaan tersebut, persoalan aset yang terjadi bukan di masa kepemimpinan Gubernur Cornelis, tetapi sejak provinsi Kalbar berdiri," bebarnya.

Menurut Rizal, ada beberapa aset yang dikerjasamakan dan diperbolehkan oleh Peraturan Pemerintah No.6/2006 tentang pengelolaan barang milik daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan PP No 60/2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.

Rizal menjelaskan, BPK melakukan pengujian pada sistem pengendalian intern yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian.

Rizal berharap, rekomendasi yang telah dikeluarkan BPK tersebut dapat ditindaklanjuti secepat mungkin sesuai dengan batas waktu.

"Kepada DPRD Kalbar, kiranya dapat menggunakan hasil pemeriksaan tersebut secara optimal untuk melaksanakannya hak budget, hak kontrol dan hak legislasi dewan sehingga dapat menjalankan kewenangan secara efektif untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," katanya. (rhd/ant)